

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/320498310>

Teknik Perencanaan & Pengelolaan Kota Pusaka

Conference Paper · March 2010

CITATIONS

0

READS

402

1 author:



Laretna Adishakti

Gadjah Mada University

10 PUBLICATIONS 8 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



Conservation and Management of Heritage City [View project](#)



Heritage Conservation [View project](#)

TEKNIK PERENCANAAN & PENGELOLAAN KOTA PUSAKA¹

Laretna T. Adishakti²

I. PERMASALAHAN

1. Citra Kota & Pemda: Arsitektur Pusaka Perlu Diamankan

Arsitektur pusaka merupakan salah satu ragam pusaka kota dan kabupaten. Sekaligus memiliki andil memberikan citra dan identitas kota yang sejatinya memiliki keunggulan-keunggulan yang tidak hanya berarti pada waktu lalu tetapi juga di masa kini maupun mendatang. Adalah menjadi persoalan bagaimana kita semua menyikapi tinggalan tersebut yang sering kali terlihat kumuh, tidak bersinar dan menggoda banyak pihak untuk justru dihancurkan saja. Kenyataan di Indonesiapun banyak arsitektur pusaka dihabisi.

Bahkan akhir-akhir ini banyak media massa dan organisasi pelestari pusaka menyoroti maraknya kota-kota di Indonesia yang melakukan penghancuran bangunan pusaka, termasuk juga kasus Pusat Informasi Majapahit yang merusak Situs Kota Jawa di Trowulan. Kadang perusakan tidak dilakukan dengan membumi hanguskan arsitektur pusaka namun dilakukan pencerabutan dari lokasi asal dan dipindahkan ke tempat lain. Telah banyak diskusi, seminar, workshop dilakukan banyak pihak, namun selama ketentuan hukum masih meragukan dan masyarakat serta pemerintah daerah merasakan keuntungan terhadap dimilikinya pusaka tersebut, identitas dan kekayaan kota tersebut akan sangat rentan.



Gambar 1. Pemberitaan Kasus Perusakan Arsitektur Pusaka

Padahal banyak juga contoh yang justru menunjukkan bila arsitektur pusaka tersebut dimanfaatkan dan dilestarikan dengan benar berbagai keuntungan baik secara ekonomi, sosial-budaya hingga ilmu pengetahuan akan diperoleh. Belum lagi kemudian bila arsitektur pusaka ini dikembangkan bersama dengan pusaka-pusaka yang lain termasuk pusaka budaya tak ragawi seperti seni budaya, dll., vitalitas yang bersinar dari pusaka-pusaka tersebut akan mampu menyedot banyak pihak untuk mengunjunginya.

¹ Disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Jaringan Kota Pusaka Indonesia, Ternate, 22 – 23 Maret 2010

² Anggota Dewan Pimpinan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia; Dosen, Jurusan Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik UGM; Email: laretna@ugm.ac.id



Bekas kantor Bank Indonesia di Jakarta Kota dimanfaatkan sebagai museum (Foto: LTA 2008)



Bekas Gudang Ransum dimanfaatkan sebagai museum di Sawahlunto (Foto: LTA 2010)



Bangunan Indish di Kota Lama Semarang dimanfaatkan sebagai restoran (Foto: LTA 2010)



Rumah tinggal di Laweyan Solo dimanfaatkan sebagai hotel (Foto: LTA 2009)



Bekas Stasiun KA di Bedono, Jawa Tengah dipersiapkan untuk restoran (Foto: LTA 2005)



Rumah tradisional korban gempa di Kotagede Yogyakarta menjadi Kantor Pusat Gerakan Pusaka UGM (Foto: LTA 2009)

Gambar 2. Pemanfaatan Baru dan Olah Disain Arsitektur Pusaka

Memanfaatkan dan melestarikan berbagai arsitektur pusaka yang merupakan identitas suatu tempat perlu strategi dan pranata olah disain serta aspek kelembagaan dan legal yang melingkupinya dengan tepat. Di sini peran kepala daerah beserta staf yang menunjukkan keberpihakan kepada pelestarian pusaka sangat berpengaruh terhadap masa depan pusaka-pusaka kota/kabupaten bahkan citra daerah itu sendiri. Keberpihakan ini akan terlihat melalui citra kota yang terwujud karena kepekaan, selera, dan kreatifitas pengelolanya.

2. Kecenderungan Dunia:

Jalan Layang Tengah Kota Perlu Dihancurkan

Kota adalah tempat manusia hidup, layak, nyaman dan aman. Bukan sekedar wadah sirkulasi lalu lintas antar kota. Kota yang benar adalah kota yang "memelihara" dan dipelihara untuk dan oleh warganya. Bukan pula justru warga dipinggirkan ke jauh dari pusat kota. Kecenderungan dunia kini telah menyadari akan kesalahan-kesalahan perencanaan kota yang memindahkan permukiman ke pinggiran kota. Sebuah upaya yang justru telah menciptakan begitu banyak persoalan seperti lalu lintas, kriminalitas tengah kota yang justru mati di malam hari, dll.

Kita tengok misalnya di Kota Milwaukee, Wisconsin, AS. Tahun 2002, jalan layang yang berada di tengah kota dihancurkan dan dibersihkan untuk dibangun kembali "kampung-kampung" kota yang telah hilang pada tahun 60-70an. Demikian pula di Kota Boston, AS, jalan-jalan layang dipindahkan "melayang" di dalam tanah. Proyek jalan raya termahal di AS ini dikenal sebagai Big Dig Project. Jalan-jalan yang terlihat di muka tanah diarahkan menjadi pedestrian – sebuah usaha memanusiakan manusia.

Penghapusan jalan layang tidak saja diarahkan untuk menghidupkan kembali perumahan di pusat kota, tetapi juga untuk mengembalikan kondisi pusaka alam seperti semula. Contohnya adalah bagian sungai di kawasan Nippohashi, Tokyo,

Jepang yang tertutup dari sinar matahari akibat ada jalan layang di atasnya. Dalam program 10 tahun ke depan sejak tahun 2007, jalan layang tersebut akan "dipindahkan" di bawah sungai, agar sungai dan lingkungannya dapat hidup layak alamiah tersinar matahari sepanjang jaman. Banyak hal dapat kita pelajari dari kesalahan-kesalahan tersebut. Terbayangkan pula usaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut betapa sulit penyelesaian dan mahal biayanya.



Gambar 3. Jalan layang di tengah Kota Milwaukee, Wisconsin, AS dihancurkan untuk dikembalikan menjadi area permukiman (Foto: LTA, 2002)

3. Telaah Penanganan Kota/kabupaten Pusaka Perlu Digalakkan

Untuk memahami seberapa jauh perencanaan dan pengelolaan kota pusaka telah dilakukan perlu dibuat perbandingan dengan berbagai acuan yang relevan. Di antaranya Piagam Washington (Piagam Pelestarian Kota dan Kawasan Perkotaan Pusaka) yang diadopsi dari Sidang Umum International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) di Washington D.C., Oktober 1987, dan Pedoman Pengelolaan Kota Pusaka Dunia yang dikeluarkan oleh Organization of World Heritage Cities (Pedoman OWHC, 2003). Kerangka piagam dan pedoman tersebut dapat dicermati pada butir II, serta ringkasan pada lampiran 2.

Meskipun demikian perlu pula melihat indikator berikut ini:

- a. Seberapa jauh upaya pengamanan pusaka-pusaka kota (alam, budaya ragawi dan tak ragawi, saujana) dari kerusakan kehancuran sudah dilakukan?
- b. Sudahkah aspek legal pelestarian kawasan pusaka memadai?
- c. Apakah aspek kelembagaan akomodatif terhadap pelestarian kawasan pusaka yang holistik?
- d. Adakah inventarisasi, registrasi dan dokumentasi pusaka-pusaka kota? Lembaganya?
- e. Apakah ruang lingkup perencanaan kota/desa kawasan sudah menyentuh aspek pelestarian pusaka?
- f. Adakah aspek legal olah disain arsitektur/kawasan pusaka?
- g. Seberapa besar kompetensi SDM pelestarian pusaka di Kota-kota Pusaka di Indonesia ?

4. Dari Atlas Pusaka hingga Aksi-aksi Pelestarian

Terkait dengan banyaknya arsitektur pusaka yang dihilangkan, demikian juga banyak pusaka-pusaka kota lainnya yang menipis, perencanaan dan pengelolaan Kota Pusaka mensyaratkan serangkaian teknik pelestarian. Pada umumnya setiap langkah aksi pelestarian akan melalui tahap inventarisasi, pendataan, dokumentasi dan presentasinya. Untuk itu sebuah Atlas Pusaka yang di dalamnya memerinci sebaran

berbagai ragam pusaka baik alam, budaya, saujana, maupun arah pemandangan indah menjadi suatu kebutuhan sebuah Kota Pusaka.

Aksi pelestarian yang terkait dengan persoalan Arsitektur pusaka adalah Olah Disain Arsitektur/Kawasan Pusaka³. Teknik ini adalah secara kreatif dan inovatif memanfaatkan kembali arsitektur/kawasan pusaka untuk kegiatan yang dinamik dan mengolah disainnya sesuai dengan kebutuhan masa kini dan mendatang dengan tetap menjunjung tinggi nilai pusaka yang terkandung di dalamnya.

Namun sebelum melakukan intervensi olah disain, wajib dilakukan inventarisasi dan dokumentasi pusaka yang akan diolah. Hasil dokumentasi inipun juga dapat digunakan untuk kepentingan bentuk pelestarian lainnya, termasuk menyusun atlas pusaka, juga daftar pusaka yang telah berkekuatan hukum.

Permasalahannya adalah masih terbatas panduan dan referensi untuk menyusun Atlas Pusaka yang memiliki isi pusaka secara komprehensif serta untuk melakukan Olah Disain Arsitektur/kawasan Pusaka lengkap dengan dokumentasinya.

II. MENUJU KOTA PUSAKA YANG LESTARI

Mengingat isu Kota Pusaka merupakan hal yang baru di Indonesia, penjabaran pada bagian ini mengacu pada Piagam Washington (Piagam Pelestarian Kota dan Kawasan Perkotaan Pusaka) yang diadopsi dari Sidang Umum International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) di Washington D.C., Oktober 1987, dan Pedoman Pengelolaan Kota Pusaka Dunia yang dikeluarkan oleh Organization of World Heritage Cities (Pedoman OWHC, 2003). Beberapa teks dan konteks dari Indonesia tetap menjadi bahan pertimbangan juga.

A. Pengertian Kota dan Kota Pusaka

Dalam Pedoman OWHC (2003) pemahaman tentang "Kota" dikategorikan dalam 3 hal, yaitu:

1. **Kota pusaka yang sudah tidak dihuni** tetapi menyediakan bukti-bukti arkeologi masa lalu yang tidak berubah. Dalam hal ini umumnya kriteria keaslian dan tingkat pelestarian lebih mudah dikendalikan;
2. **Kota pusaka yang masih dihuni dan secara alamiah tumbuh dan dibangun**, akan terus berkembang di bawah pengaruh sosial ekonomi dan perubahan budaya. Suatu situasi yang menggambarkan kesulitan dalam mempertahankan keasliannya, dan apapun kebijakan pelestarian akan lebih problematik.
3. **Kota baru abad 21 yang memiliki masalah paradoks**, di satu sisi kemungkinan memiliki kawasan pusaka, namun keasliannya ada yang masih bisa dilacak namun ada juga yang sulit dikenali. Masa depan sering tidak jelas karena pembangunan umumnya tidak terkendali.

Berdasar pedoman tersebut di atas ditunjukkan pula bahwa suatu kota pusaka akan memiliki organisasi ruang, struktur, material, bentuk dan fungsi kelompok bangunan. Elemen-elemen tersebut akan merefleksikan peradaban atau meneruskan peradaban di kota tersebut. Kategori kota 1 dan 2 sebagaimana diuraikan di atas dapat dikategorikan sebagai Kota Pusaka. Sementara itu Pedoman OWHC (2003) menunjukkan ada 4 kategori kawasan perkotaan pusaka dalam suatu Kota Pusaka sebagai berikut:

³ Lihat makalah Laretna T. Adishakti "Tantangan Kota Pusaka Indonesia" disampaikan dalam Kongres I Jaringan Kota Pusaka Indonesia, di Sawahlunto, 2009.

1. **Kota yang merupakan tipe suatu periode atau budaya tertentu**, yang secara keseluruhan dilestarikan. Umumnya tidak banyak terpengaruh oleh perkembangan kota. Di sini properti yang didaftar adalah keseluruhan kota termasuk lingkungannya yang juga harus dilindungi. Kota Sawahlunto dengan ekspresi tinggalan kota tambang dengan periode waktu tertentu dan memiliki budaya khas dimerupakan salah satu contohnya.
2. **Kota yang berevolusi dalam suatu garis karakteristik dan dilestarikan**, kadang berada di tengah-tengah lingkungan alam yang tersendiri, penataan spasial dan struktur yang merupakan tipe tahap lanjut dari sejarah sebelumnya. Dalam kondisi ini dapat dikatakan dengan jelas bahwa sejarah berada dalam lingkungan kontemporer. Contoh Kota Semarang atau Kota Padang, di dalamnya ada Kota Lama yang dilingkupi dengan lingkungan baru.
3. Pusat-pusat bersejarah yang melingkupi kawasan yang sama dengan **kawasan masa purbakala namun sekarang tertutup dengan kota modern**. Di sini perlu ditetapkan dengan tepat batas properti dalam dimensi kesejarahannya serta menetapkan dengan tepat batas sekelilingnya. Contoh Kota Yogyakarta, Kota Solo, dll.
4. **Sektor, kawasan atau unit terisolasi yang masih tersisa dan hidup**, menunjukkan bukti pasti suatu karakter kota bersejarah yang sudah hilang. Untuk kasus-kasus seperti ini kawasan dan bangunan-bangunan yang masih tersisa harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi masa lalu secara keseluruhan. Contoh Kota Makasar, Kota Nang, dll.

B. Prinsip-prinsip Pelestarian Kota Pusaka

Mengacu berbagai referensi dan pengalaman lapangan dalam mengelola pelestarian Kota Pusaka perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Perlu **identifikasi kualitas tertentu** yang menyebabkan suatu situs pusaka perkotaan dianggap penting (Pedoman OWHC, 2003). Kualitas yang perlu dilestarikan adalah karakter bersejarah kota atau kawasan perkotaan dan segala elemen material dan spiritual yang mengekspresikan karakter tersebut, khususnya (Piagam Washington, 1987):
 - a. Pola perkotaan yang ditentukan oleh persil tanah (lot) dan jalan-jalan
 - b. Hubungan antara bangunan, area hijau dan ruang-ruang terbuka
 - c. Tampilan formal bangunan, interior dan exterior, yang ditentukan oleh skala, ukuran, langgam, konstruksi, material, warna dan dekorasi
 - d. Hubungan antara kota atau area perkotaan dengan lingkungan sekitarnya, baik alam maupun buatan manusia, dan
 - e. Berbagai fungsi yang ada pada kota atau area perkotaan dari waktu ke waktuAncaman apapun pada kualitas di atas akan merubah keaslian kota dan perkotaan kota pusaka.
5. Perlu **proses yang sistematis** yang digunakan untuk inventarisasi, penelitian, dan penilaian suatu aset pelestarian (Pedoman OWHC, 2003). Proses tersebut diupayakan untuk menjaga kesinambungan, keserasian, dan daya dukungnya dalam menjawab dinamika jaman untuk membangun kehidupan bangsa yang lebih berkualitas (Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia 2003);
6. Perlu dan agar menjadi efektif, dalam perencanaan pelestarian, tujuan pelestarian menjadi **bagian integral dengan berbagai tujuan dan kebijakan pembangunan sosial dan ekonomi** yang telah ditetapkan serta perencanaan perkotaan dan daerah di semua aras (Piagam Washington, 1987; Pedoman OWHC, 2003).

7. Perlu dan harus terus menerus didorong untuk **melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelestarian**. Pelestarian kota dan kawasan perkotaan pusaka yang pertama adalah mempedulikan penduduknya (Piagam Washington, 1987; Pedoman OWHC, 2003). Bahkan peran serta tersebut bukan sekedar partisipasi namun menjadi pelaku pengelolaan – *People centered management* (Adishakti, 2003)
8. Perlu meyakinkan bahwa penilaian keuangan atas **suatu pembangunan baru tidak merusak situs perkotaan pusaka** (Pedoman OWHC, 2003).;
9. Perlu **mendorong pemerintah pusat dan daerah** menggunakan kewenangannya dalam menata dan menggunakan peraturan dan pendanaan yang tepat (Pedoman OWHC, 2003);
10. Perlu memahami bahwa setiap persoalan **pelestarian pusaka adalah unik**. Untuk itu pelestarian dalam kota atau kawasan perkotaan pusaka menuntut kelenturan pendekatan dan disiplin yang sistematis. **Pendekatan yang kaku perlu dihindari**, mengingat setiap kasus akan memiliki masalah-masalah sendiri yang khusus (Piagam Washington, 1987; Pedoman OWHC, 2003).

C. Metode dan Instrumen

Dalam melaksanakan pengelolaan dan perencanaan pelestarian Kota Pusaka perlu memperhatikan metoda dan instrument sebagai berikut (Piagam Washington, 1987; Pedoman OWHC, 2003):

1. **Perencanaan pelestarian kota dan kawasan perkotaan pusaka perlu dilakukan melalui studi-studi multi disiplin dan holistik**. Oleh karena itu perencanaan pelestarian kota dan kawasan perkotaan pusaka perlu:
 - a. Memperhitungkan berbagai faktor termasuk pembangunan berkelanjutan, arkeologi, sejarah, arsitektur, teknik, sosiologi dan ekonomi.
 - b. Pemahaman tentang sejarah kota atau kawasan perkotaan pusaka perlu ditingkatkan melalui investigasi arkeologi dan pemugaran temuan arkeologi dengan tepat.
 - c. Dinyatakan dengan jelas prinsip tujuan rencana pelestarian serta hal-hal yang terkait dengan aspek legal, perhitungan administrasi dan keuangan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
 - d. Bertujuan agar diperoleh hubungan harmonis antara kawasan perkotaan pusaka dan kota secara keseluruhan.
 - e. Perbaikan perumahan hendaknya menjadi salah satu dari tujuan-tujuan pelestarian.
 - f. Menunjukkan bangunan-bangunan mana saja yang harus dipugar, mana yang dilestarikan dengan kondisi tertentu, dan mana dengan kondisi perkecualian yang mungkin dapat dilakukan olah disain.
 - g. Dilakukan dokumentasi kondisi area yang ada secara lengkap sebelum dilakukan intervensi apapun;
 - h. Didukung oleh penduduk kawasan pusaka..
2. **Menyusun strategi pemanfaatan dan olah disain arsitektur/kawasan pusaka**
 - a. Merupakan instrument disain yang mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan dan pengendalian pertumbuhannya;
 - b. Fungsi dan kegiatan baru harus sesuai dengan karakter kota atau kawasan perkotaan pusaka. Olah disain kawasan yang diperuntukan bagi kehidupan kontemporer mensyaratkan instalasi atau perbaikan fasilitas pelayanan publik

- c. Ketika perlu mendirikan bangunan baru atau olah disain bangunan pusaka, tata letak spasial yang ada harus dijunjung tinggi, terutama dalam konteks skala dan ukuran lot tanah. Mencangkokan elemen kontemporer yang memiliki harmoni dengan lingkungan hendaknya jangan dibatasi mengingat elemen-elemen tersebut dapat pula menambah citra dan keelokan terhadap kawasannya.
3. **Memposisikan pelestarian pusaka sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan** melalui 3 tahap pendekatan yaitu advokasi, integrasi, dan keberlanjutan.
 - a. *Advokasi* menunjukkan pandangan pelestarian; mengupayakan pandangan tentang pelestarian ini sederajat dengan berbagai persoalan yang lain. Tujuannya untuk peningkatan kepedulian. Bila kepedulian sudah meningkat kembangkan karakteristik lembaga pengelolaan, serta memulai masuk dalam kebijakan pembangunan dan strategi pelaksanaannya;
 - b. *Integrasi* promosikan pandangan pelestarian ini menjadi satu kesatuan dengan berbagai pandangan sektor-sektor yang lain; membangun kapasitas teknis terkait dengan isu ini;
 - c. *Keberlanjutan* mengawasi tingkat efektifitas pelestarian dalam kelembagaan pemerintah yang ada; meningkatkan terus kapasitas teknis di bidang ini.
4. **Pemeliharaan yang terus-menerus walau merupakan hal yang rumit** namun harus dilaksanakan demi mencapai pelestarian kota atau area perkotaan pusaka yang efektif.
5. **Aksesibilitas.**
 - a. Lalu-lintas di dalam kota atau kawasan perkotaan pusaka harus dikontrol dan area parkir perlu direncanakan sehingga tidak merusak unsur-unsur bersejarah atau lingkungannya.
 - b. Ketika perencanaan perkotaan atau perwilayahan menyediakan konstruksi jalan raya, hendaknya hal ini tidak masuk ke dalam kota atau kawasan perkotaan pusaka, namun mereka perlu meningkatkan akses ke sana.
6. Kota-kota pusaka perlu **dilindungi dari bencana alam dan gangguan** seperti polusi dan getaran-getaran agar pusaka terselamatkan dan demi keamanan dan kenyamanan penghuni. Meskipun bencana belum menerjang kota atau kawasan perkotaan pusaka, kesiapan dan perangkat perbaikan perlu disesuaikan dengan karakter spesifik pusaka yang terkena bencana.
7. **Peningkatan Sumber Daya Manusia**
 - a. Dalam rangka meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat, program informasi umum perlu dipersiapkan bagi para penduduk kota, mulai dari anak usia sekolah.
 - b. Pelatihan khusus perlu disediakan untuk semua profesi yang terkait dengan pelestarian.
8. Selama pelaksanaan aksi pelestarian, semua kegiatan **perlu sejalan dengan prinsip** piagam Washington dan Piagam Venice, serta berbagai pedoman yang relevan.

D. Strategi Pengelolaan

Kunci strategi pengelolaan Kota Pusaka agar dapat berjalan dengan baik adalah sebagai berikut (Pedoman OWHC, 2003):

1. **Menjunjung dinamika kota.** Upaya pelestarian untuk peningkatan kualitas kota pusaka tidak hanya tertuju pada bentuk fisik lingkungan tetapi juga kehidupan yang hidup di dalam kota. Kehidupan yang ada perlu dijaga. Fokus pada karakteristik kota atau kawasan perkotaan secara menyeluruh (kegiatan, fungsi dan hubungan antara keduanya). Hal ini akan membantu mengarahkan strategi jangka panjang dengan arah yang tepat.
2. **Menjunjung nilai partisipasi publik.** Kesuksesan jangka panjang dalam strategi pelestarian sangat tergantung pada seberapa jauh masyarakat dapat berperan serta dalam indentifikasi dan perlindungan kualitas pusaka masyarakat itu. Di banyak kota, pelestari profesional, yang sudah mumpuni di bidang inipun tetap mencari cara yang paling jitu yaitu bekerja bersama masyarakat dalam memahami dan menjaga pusaka-pusaka mereka.
3. **Integrasi dengan tujuan pembangunan kota yang lain.** Strategi pengelolaan yang berhasil juga karena integrasi dengan berbagai tujuan pembangunan yang lain baik di sector public maupun swasta.
4. **Pendekatan positif pada pengelolaan konflik.** Dalam kegiatan pelestarian sering kali menghadapi keadaan yang tidak sejalan. Di satu pihak akan melestarikan namun di pihak lain berusaha untuk menggantikan dengan struktur baru. Konflik-konflik seperti ini hanya dapat diatasi bila ada minat yang sama dari kedua belah pihak. Bila konflik sulit diatasi oleh dedua belah pihak, untuk melaukan resolusi konflik perlu mengundang profesional di bidang ini.
5. **Penyesuaian Budaya.** Salah satu tantangan adalah bagaimana berbagai budaya yang tumbuh berkembang tetap menjunjung tradisi yang ada. Sementara budaya tradisi itu sendiri mampu tetap hidup menembus jaman.

III. ATLAS PUSAKA

Atlas Pusaka adalah suatu peta yang memerinci sebaran berbagai ragam pusaka baik alam, budaya, saujana, maupun arah pemandangan indah beserta rincian informasinya secara lengkap. Sudah saatnya kota dan kabupaten anggota JKPI memiliki pranata/mekanisme sendiri yang disepakati dalam menyusun data tentang pusaka kota/kabupaten yang dimiliki secara lengkap. Hendaknya pula pranata tersebut disusun sendiri oleh JKPI sehingga setiap kota/kabupaten memiliki skema yang sama dalam penyusunan atlasnya.

Sebuah contoh dari Denmark yaitu InterSAVE, International Survey of Architectural Values in the Environment (Kementrian Lingkungan Hidup dan Energi, Denmark, 1997) dapat dijadikan acuan untuk kemudian dikembangkan tidak hanya tentang pusaka arsitektural tetapi juga seluruh ragam pusaka kota/kabupatennya.

Upaya untuk mengembangkan sistem survai ini ditanda tangani pada tahun 1985 dalam Konvensi Granada. Konvensi ini menyepakati terminology “architectural heritage”/pusaka arsitektur diartikan lebih luas dari pada sebelumnya, khususnya tentang “groups of buildings”, yang menekankan pada inventarisasi dan mempersiapkan dokumentasi yang tepat dengan tujuan identifikasi akurat untuk monumen, kelompok bangunan dan situs yang diproteksi.

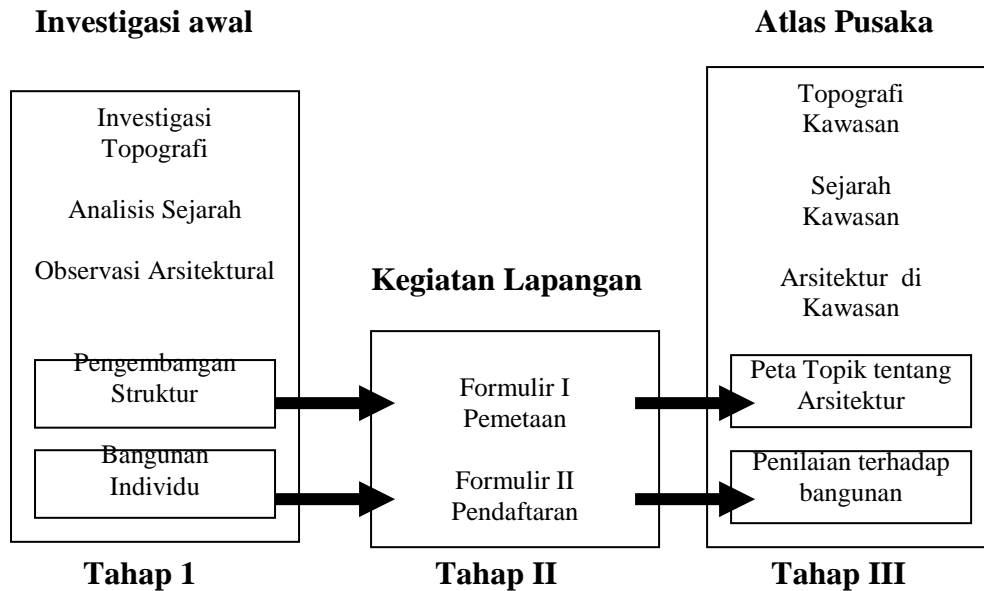


Diagram 1. InterSAVE, International Survey of Architectural Values in the Environment (Kementerian Lingkungan Hidup dan Energi, Denmark, 1997)

Upaya investigasi ini dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan dan Energi Denmark dengan sebutan "the SAVE registration system" (Survey of the Architectural Values in the Environment). Sistem dibuat agar secara cepat dapat diketahui kondisi pusaka arsitektur pada suatu kawasan. Prosedurnya dapat dibandingkan dengan "eskavasi penyelamatan", sebagaimana dikenal dalam arkeologi.

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam inventarisasi:

- Fleksibel dalam kaitan dengan kondisi lokal
- Menyusun kelompok kerja yang melibatkan politisi lokal, ekonom, dan pemerhati lokal lainnya seperti dari LSM
- Metoda dan terminologi pasti
- Waktu dan biaya pasti

Proses secara keseluruhan dibagi dalam 3 tahap, dan dapat dilakukan selama 9 bulan untuk kawasan dengan 6000 bangunan. Sebelum proyek diumumkan, pemerintah lokal dan pusat menandatangani kesepakatan tentang kawasan mana yang akan dilakukan, konsultan apa yang akan melakukan proyek inventarisasi.

Tahap I. Investigasi Awal

Konsultan melakukan koleksi dan adaptasi informasi yang tersedia tentang topografi, sejarah dan karakteristik arsitektural kawasan yang diinventarisasi. Juga dilakukan pendaftaran awal dalam rangka mencocokkan dengan informasi umum yang didapatkan.

Tahap II. Kegiatan Lapangan

Inventarisasi arsitektural dilakukan dengan dua cara yaitu pengembangan struktur dan bangunan individu:

- Pengembangan struktur** merupakan suatu entitas wajah kota (*townscapes*) dan memungkinkan dievaluasi secara menyeluruh. Yakni dapat dievaluasi dari beberapa kelompok bangunan ke seluruh jalan, alun-alun, kawasan atau bahkan seluruh kota. Dasar pertimbangannya adalah kriteria arsitektural, sejarah dan topografi.

Pengembangan struktur ini dapat dibagi dalam 3 kategori yaitu: a) Komponen arsitektur yang dominan, b) Pola bangunan dan c) Elemen urban terpilih, sbb:

- a) **Komponen arsitektur yang dominan:**
Keruangan secara komprehensif yang terkait dengan implikasi struktural untuk kota dan sekelilingnya, seperti profil kota, town fronts, jalan-jalan utama, bangunan yang dominan, monumen, alun-alun dan taman.
- b) **Pola bangunan:**
Termasuk karakteristik area, pola grid, area diwarnai dengan sistem cadastral, aturan bangunan, misalnya pola jalan, alun-alun/taman, blok, bangunan-bangunan dan taman-taman.
- c) **Elemen urban terpilih:**
Merupakan detil arsitektural perkotaan seperti ruang-ruang jalan, squares, taman, avenue, tipe bangunan khusus dan fasad.
- b. **Bangunan Individu** diidentifikasi oleh sistem identifikasi nasional. Informasi dasar seperti umur, material, jumlah lantai dan volume termasuk diskripsi detil diberikan dalam penomoran dengan kode identifikasi. Bagian paling penting dalam diskripsi bentuk ini adalah evaluasi yang terdiri dari 5 evaluasi yang berbeda yaitu:
 - a) Nilai arsitektural: proporsi, harmoni komposisi, karya arsitek yang berkualitas
 - b) Nilai budaya-sejarah: bukti-bukti penggunaan sosial pada waktu lalu yang penting, merupakan tingkatan suatu kerajinan tangan atau teknologi tertentu
 - c) Nilai lingkungan: tingkatan harmoni dengan lingkungan
 - d) Keaslian: tingkatan dari eksterior asli yang dilestarikan, hasil dari rehabilitasi yang tepat
 - e) Kondisi teknis: dalam perbaikan yang baik atau jelek

Tahap III. Atlas Pusaka

Pekerjaan akan berakhir dengan publikasi Atlas Pusaka yang memberikan ilustrasi rangkuman dari investigasi awal dan pekerjaan pemetaan dan pendaftaran di lapangan. Tujuan dari atlas ini adalah membuat hasil-hasil yang penting mudah diakses dan dibaca bagi masyarakat lokal, menciptakan – melalui cara ini – suatu pemahaman bersama tentang referensi yang digunakan baik oleh pemerintah lokal maupun penduduk lokal.

Atlas umumnya terdiri atas elemen-elemen seperti berikut:

- a. Pengantar dari pemerintah dengan menyampaikan tujuan pempresentasikan hasil ini kepada publik serta merupakan bagian dari proses perencanaan pelestarian
- b. Diskripsi topografi perkotaan dan kondisi alam dimana pengembangan bersejarah dilaksanakan
- c. Peninjauan kembali pengembangan bersejarah dari kota
- d. Peninjauan kembali karakteristik arsitektur lokal
- e. Presentasi kartografi dari struktur berkembang dengan penjelasan, dan kualitas yang harus diselamatkan
- f. Presentasi kartografi dari bangunan individu yang terdaftar, ditunjukkan dengan warna yang berbeda untuk menunjukkan tingkatan nilainya: tinggi, menengah, dan rendah
- g. Rangkuman final dari nilai arsitektural utama kota, dan mengapa pemerintah kota perlu memberikan prioritas pada aset-aset tersebut dalam perencanaan di masa datang dan kegiatan pengawasan bangunan.

Untuk konteks Kota Pusaka Indonesia yang kaya dengan beragam pusaka alam, budaya ragawi dan tak ragawi maupun saujana, Atlas Pusaka tersebut perlu dikembangkan tidak hanya terpaku pada arsitektur pusaka saja namun juga menjadi rangkuman beragam pusaka kota/kabupaten yang ada. Upaya pembuatan pedoman

Atlas Pusaka hendaknya bisa menjadi program JKPI agar gerakan penyusunan Atlas Pusaka dapat dilaksanakan di setiap kota/kabupaten pusaka.

IV. PERAN JARINGAN KOTA PUSAKA INDONESIA

Mencermati perangkat perencanaan dan pengelolaan Kota Pusaka masih sangat terbatas diusulkan agar JKPI dapat menyusun:

1. Pedoman penyusunan Atlas Pusaka bagi setiap kota/kabupaten pusaka
2. Etika pelestarian tentang Kota Pusaka sebagaimana disepakati oleh anggota JKPI dan organisasi pelestarian yang terkait. Referensi adalah Piagam Washington 1987 dan Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia 2003.
3. Pedoman pelestarian dan pengelolaan Kota Pusaka dengan konteks kota-kota Indonesia
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Kota Pusaka melalui pelatihan dan pendidikan formal.

DAFTAR PUSTAKA

- 2003. "PIAGAM PELESTARIAN PUSAKA INDONESIA 2003" Piagam disusun oleh pelaku dan pemerhati pelestarian pusaka Indonesia.
-2003. "THE WORLD HERITAGE CITIES MANAGEMENT GUIDE" Organization of the World Heritage Cities, Quebec.
-1987. "THE CHARTER ON THE CONSERVATION OF HISTORIC TOWNS AND AREAS". ICOMOS General Assembly at Washington DC.
- Adishakti, Laretna T. 2003. "PENGELOLAAN KAWASAN DAN BANGUNAN BERSEJARAH: Futuristik berdasar pusaka lokal, *people-centered management*, multipihak, holistik, dan berkelanjutan". Materi Pra Kursus Pelatihan Revitalisasi Kota dan Pengembangan Ekonomi Daerah, diselenggarakan oleh Ditjen Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan, KIMPRASWIL di Jakarta.
- Adishakti, Laretna T. 1997. "A STUDY ON THE CONSERVATION PLANNING OF YOGYAKARTA HISTORIC-TOURIST CITY BASED ON URBAN SPACE HERITAGE CONCEPTION", unpublished dissertation, Kyoto University.
- Ashworth, GJ. 1991. "HERITAGE PLANNING: conservation as management of change". Geo Press, the Netherlands.
- Larkham, Peter J. 1996. "CONSERVATION AND THE CITY". Routledge, London and New York.
- Zuziak, Zbigniew, Editor in Chief. 1993. "MANAGING HISTORIC CITY". International Cultural Centre, Krakow.

Lampiran 1

PIAGAM PELESTARIAN KOTA DAN KAWASAN PERKOTAAN PUSAKA (Piagam Washington - 1987)

Adopsi dari Sidang Umum International Council on Monuments and Sites (ICOMOS)
di Washington D.C., Oktober 1987

PEMBUKAAN DAN DEFINISI

Semua masyarakat perkotaan, apakah dibangun secara bertahap dari waktu ke waktu atau langsung dirancang seperti itu, adalah ekspresi keragaman masyarakat sepanjang sejarah.

Piagam ini peduli terhadap kawasan perkotaan pusaka, baik besar dan kecil, termasuk kota-kota dan pusat-pusat kota pusaka, termasuk lingkungan alam dan buatan. Dibalik peran mereka sebagai dokumen sejarah, di dalamnya memiliki nilai-nilai budaya perkotaan tradisional. Saat ini banyak area-area tersebut dalam kondisi terancam, secara fisik semakin rusak bahkan dirusak oleh dampak

pengembangan perkotaan industrialisasi di berbagai wilayah di mana saja.

Menghadapi situasi dramatik tersebut, yang sering menjadikan hilangnya budaya, sosial, bahkan ekonomi, the International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) merasa perlu untuk menyusun piagam internasional bagi kota dan kawasan perkotaan pusaka sebagai bagian dari "International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites," yang biasanya disebut sebagai "The Venice Charter" (Piagam Venice). Piagam baru ini menyatakan prinsip-prinsip, tujuan, dan metoda yang diperlukan dalam pelestarian kota dan kawasan perkotaan pusaka. Hal ini juga untuk mempromosikan harmoni antara kehidupan pribadi dan masyarakat pada area-area tersebut serta mendorong pelestarian properti budayanya, walau dalam skala yang terbatas tetap mampu mempertahankan kenangan manusia.

Sebagaimana dinyatakan dalam UNESCO "Recommendation Concerning the Safeguarding and Contemporary Role of Historic Areas" (Warsaw - Nairobi, 1976), serta beberapa instrumen internasional lainnya, "pelestarian kota dan kawasan perkotaan pusaka" dipahami pula sebagai langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk perlindungan, pelestarian dan restorasi kota-kota dan kawasan tersebut sekaligus perkembangannya dan adaptasi secara seimbang dalam kehidupan kontemporer.

PRINSIP-PRINSIP DAN TUJUAN

1. Agar menjadi efektif, pelestarian kota dan kawasan perkotaan pusaka perlu menjadi bagian integral dalam kebijakan pembangunan ekonomi dan social serta perencanaan perkotaan dan daerah di semua aras;
2. Kualitas untuk dilestarikan termasuk karakter bersejarah kota atau kawasan perkotaan serta segala elemen material dan spiritual yang mengekspresikan karakter tersebut, khususnya:
 - a. Pola perkotaan yang ditentukan oleh persil tanah (lot) dan jalan-jalan
 - b. Hubungan antara bangunan, area hijau dan ruang-ruang terbuka
 - c. Tampilan formal bangunan, interior dan exterior, yang ditentukan oleh skala, ukuran, langgam, konstruksi, material, warna dan dekorasi
 - d. Hubungan antara kota atau kawasan perkotaan dengan lingkungan sekitarnya, baik alam maupun buatan manusia, dan
 - e. Berbagai fungsi yang ada pada kota atau kawasan perkotaan dari waktu ke waktuAncaman apapun pada kualitas di atas akan merubah keaslian kota dan kawasan perkotaan kotapusaka
3. Partisipasi dan keterlibatan penduduk sangat penting demi kesuksesan program pelestarian dan hal ini memang perlu didorong. Pelestarian kota dan kawasan perkotaan pusaka yang pertama adalah mempedulikan penduduknya
4. Pelestarian kota atau kawasan perkotaan pusaka menuntut kelenturan, pendekatan dan disiplin yang sistematis. Pendekatan yang kaku perlu dihindari, mengingat setiap kasus akan memiliki masalah-masalah sendiri yang khusus.

METODA DAN INSTRUMEN

5. Perencanaan pelestarian kota dan kawasan perkotaan pusaka perlu dilakukan melalui studi-studi multi disiplin:
 1. Perencanaan pelestarian perlu memperhitungkan berbagai faktor termasuk arkeologi, sejarah, arsitektur, teknik, sosiologi dan ekonomi.
 2. Prinsip tujuan rencana pelestarian perlu dinyatakan dengan jelas sebagaimana suatu aspek legal, perhitungan administrasi dan keuangan diperlukan untuk mencapai tujuan.
 3. Rencana pelestarian harus bertujuan agar diperoleh hubungan harmonis antara kawasan perkotaan pusaka dan kota secara keseluruhan.
 4. Rencana pelestarian perlu menunjukkan bangunan-bangunan mana saja yang harus dipugar, mana yang dilestarikan dengan kondisi tertentu, dengan kondisi perkecualian mungkin dapat dilaukan olah disain.
 5. Sebelum dilakukan intervensi apapun, kondisi area yang ada perlu dilakukan dokumentasi yang lengkap.
 6. Rencana pelestarian harus didukung oleh penduduk kawasan pusaka.
6. Sampai rencana pelestarian dilaksanakan, semua kegiatan pelestarian perlu dilakukan sejalan dengan prinsip piagam ini dan Piagam Venice.

7. Pemeliharaan yang menerus merupakan hal yang rumit dalam mencapai pelestarian kota atau kawasan perkotaan pusaka yang efektif.
8. Fungsi dan kegiatan baru harus sesuai dengan karakter kota atau kawasan perkotaan pusaka. Olah disain area-area ini untuk kehidupan kontemporer mensyaratkan instalasi atau perbaikan fasilitas pelayanan publik.
9. Perbaikan perumahan hendaknya menjadi satu dari tujuan-tujuan pelestarian.
10. Ketika perlu mendirikan bangunan baru atau olah disain bangunan pusaka, tata letak spasial yang ada harus dijunjung tinggi, terutama dalam konteks skala dan ukuran lot. Mencangkokkan elemen kontemporer yang memiliki harmoni dengan lingkungan hendaknya jangan dibatasi mengingat elemen-elemen tersebut dapat pula menambah keelokan areanya.
11. Pemahaman tentang sejarah kota atau kawasan perkotaan pusaka perlu ditingkatkan melalui investigasi arkeologi dan pemugaran temuan arkeologi dengan tepat
12. Lalu-lintas di dalam kota atau kawasan perkotaan pusaka harus dikontrol dan area parkir perlu direncanakan sehingga tidak merusak unsur-unsur bersejarah atau lingkungannya
13. Ketika perencanaan perkotaan atau perwilayahan menyediakan konstruksi jalan raya, hendaknya hal ini tidak masuk ke dalam kota atau area perkotaan bersejarah, namun mereka perlu meningkatkan akses ke sana.
14. Kota-kota pusaka perlu dilindungi dari bencana alam dan gangguan seperti polusi dan getaran-getaran agar pusaka terselamatkan dan untuk keamanan dan kenyamanan penghuni. Apapun bencana yang menerjang kota atau kawasan perkotaan pusaka, kesiapan dan perangkat perbaikan perlu disesuaikan dengan karakter spesifik pusaka yang terkena bencana.
15. Dalam rangka meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat, program informasi umum perlu dipersiapkan bagi penduduk kota, mulai dari anak usia sekolah.
16. Pelatihan khusus perlu disediakan untuk semua profesi yang terkait dengan pelestarian.

Lampiran 2

EVALUASI DAN CHECK LIST KINERJA PELESTARIAN KOTA PUSAKA

A. Kesesuaian dengan Prinsip-prinsip Pelestarian Kota Pusaka

No	PRINSIP	TINDAKAN			HASIL	CATATAN
		Belum	Sedang	Sudah		
1	Identifikasi kualitas tertentu					
a.	Pusaka Saujana					
	Pola perkotaan yang terbentuk dari persil tanah (lot) dan jalan-jalan					
	Hubungan antara bangunan, area hijau dan ruang-ruang terbuka					
	Hubungan antara kota atau kawasan perkotaan dengan lingkungan sekitarnya, baik alam maupun buatan manusia,					
b	Pusaka Alam					
c	Pusaka Budaya Ragawi					
	Tampilan formal bangunan, interior dan exterior					
	- skala,					
	- ukuran,					
	- langgam,					

	- konstruksi,				
	- material,				
	- warna				
	- dekorasi				
d	Pusaka Budaya Tak Ragawi				
	Berbagai fungsi yang ada pada kota atau kawasan perkotaan dari waktu ke waktu				
2.	Proses yang sistematis:				
	- inventarisasi				
	- penelitian				
	- penilaian				
3	Sudahkan menjadi bagian integral dengan berbagai tujuan dan kebijakan pembangunan				
4	Pelibatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelestarian.				
5	Pembangunan baru tidak merusak situs perkotaan pusaka				
6	Mendorong pemerintah pusat dan daerah pro aktif pelestarian kota pusaka				
7	Pelestarian pusaka adalah unik, menghindari pendekatan yang kaku perlu dihindari,				

B. Metode dan Instrumen

No	PRINSIP	TINDAKAN			HASIL	CATATAN
		Belum	Sedang	Sudah		
1	Perencanaan pelestarian kota dan kawasan perkotaan pusaka dilakukan melalui studi-studi multi disiplin dan holistik					
a	Memperhitungkan berbagai faktor termasuk:					
	- pembangunan berkelanjutan					
	- arkeologi					
	- sejarah					
	- arsitektur					
	- teknik					
	- sosiologi - antropologi					
	- ekonomi.					
	- lingkungan hidup					
b	Paham sejarah kota, melakukan investigasi arkeologi, dan pemugaran temuan arkeologi dengan tepat.					
c	Tujuan					
	- Tujuan rencana pelestarian jelas					
	- Tujuan mengandung capaian hubungan harmonis antara kawasan perkotaan pusaka dan kota secara keseluruhan.					
	- Tujuan mengandung capaian perbaikan perumahan hendaknya menjadi salah satu dari tujuan-tujuan pelestarian.					
d	Memiliki program bangunan-bangunan mana saja yang harus dipugar, mana yang dilestarikan dengan kondisi tertentu, dan mana dengan kondisi perkecualian yang mungkin dapat dilakukan olah disain.					
e	Melakukan dokumentasi kondisi kawasan yang ada secara lengkap sebelum dilakukan intervensi apapun;					

Teknik Perencanaan & Pengelolaan Kota Pusaka

f	Didukung penduduk kawasan pusaka..					
2	Menyusun strategi pemanfaatan dan olah disain arsitektur/kawasan pusaka					
3	Memposisikan pelestarian pusaka sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan					
	<i>Advokasi</i>					
	<i>Integrasi</i>					
	<i>Keberlanjutan</i>					
4	Melakukan pemeliharaan yang terus-menerus walau merupakan hal yang rumit					
5	Aksesibilitas.					
a	Memiliki rencana kontrol dan area parkir lalu-lintas di dalam kota atau kawasan perkotaan pusaka sehingga tidak merusak unsur-unsur bersejarah atau lingkungannya.					
b	Memiliki rencana untuk tidak ada jalan raya masuk kota atau kawasan pusaka namun mereka perlu meningkatkan akses ke sana.					
6	Memiliki rencana perlindungan dan kesiapan menghadapi bencana					
7	Peningkatan SDM					
	- Memiliki informasi pelestarian pusaka anak-anak hingga umum					
	- Melakukan pelatihan khusus utk semua profesi tentang pelestarian pusaka kota					
8	Sejalan dengan Piagam Washington, Venice, Pelestarian Pusaka Indonesia & pedoman-pedoman lain					

C. Strategi Pengelolaan

No	PRINSIP	TINDAKAN			HASIL	CATATAN
		Belum	Sedang	Sudah		
1	Menjunjung dinamika kota.					
2	Menjunjung nilai partisipasi publik					
3	Integrasi dengan tujuan pembangunan kota yang lain					
4	Pendekatan positif pada pengelolaan konflik					
5	Penyesuaian Budaya					